VOL. 03, NO. 03, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BAIYA KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU

Nanda[1)]*, Nasrullah[2)], Syarif Permana Salingkat[3)], Yan Suprandy Djabier[4)]

[1] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
nandaadm@gmail.com
[2] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ullahfadhil69@gmail.com
[3] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
spsalingkat@gmail.com
[3] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fhandy2020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive sebanyak lima orang, terdiri atas unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Unit Pengelola Sampah Kelurahan Baiya, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki dasar regulasi dan mekanisme pelayanan, tetapi implementasinya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan petugas UPS yang berjumlah tiga orang, hanya satu dari dua armada roda empat yang beroperasi, keterlambatan pengangkutan, sosialisasi yang belum menjangkau masyarakat secara konsisten, serta rendahnya kepatuhan sebagian warga dan pelaku usaha terhadap tata cara pembuangan dan pemilahan sampah. Karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada pemenuhan sarana dan tenaga operasional, konsistensi jadwal pengangkutan, penguatan koordinasi, dan edukasi serta pengawasan partisipatif.

Kata kunci: **Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Sampah Rumah Tangga**

VOL. 03, NO. 03, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

This study examines the implementation of household waste management policy in Baiya Urban Village, Tawaeli District, Palu City. The analysis applies the Van Meter and Van Horn implementation model, covering policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementers' disposition, and the social, economic, and political environment. This research employed a descriptive qualitative approach. Five informants were purposively selected from the Palu City Environmental Agency, the Baiya Waste Management Unit, and the local community. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data collection, condensation, display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that although the policy has a regulatory basis and an established service mechanism, its implementation has not been optimal. Key constraints include a limited workforce of three waste-management officers, only one operational vehicle out of two available four-wheel vehicles, irregular waste collection, insufficiently consistent public outreach, and limited compliance among some residents and business operators with waste disposal and sorting practices. Improvements therefore require adequate operational personnel and facilities, reliable collection schedules, stronger coordination, and sustained public education and participatory monitoring.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Household Waste

Submisi: 17-07-2026
Diterima: 17-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

VOL. 03, NO. 03, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kenyamanan kawasan permukiman. Persoalan sampah tidak cukup ditangani melalui kegiatan pengangkutan dari rumah ke tempat pembuangan akhir. Pengelolaan yang baik juga menuntut pengurangan sampah sejak dari sumber, pemilahan berdasarkan jenis, penyediaan sarana, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan ketentuan regulasi menjadi pelayanan yang teratur dan dapat dijalankan oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan pengelolaan sampah sebagai upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di tingkat daerah, Kota Palu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi daerah tersebut menegaskan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, termasuk mengurangi sampah dari sumbernya dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, merupakan wilayah permukiman yang juga memiliki aktivitas usaha dan kegiatan industri. Aktivitas tersebut menghasilkan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, seperti sisa makanan, plastik, kertas, kaleng, dan kemasan lainnya. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang dicantumkan dalam penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kelurahan Baiya mencapai 808,66 ton pada 2021, meningkat menjadi 992,80 ton pada 2022, kemudian turun menjadi 784,75 ton pada 2023. Penurunan pada tahun terakhir belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan telah terselesaikan, sebab hasil penelitian masih menemukan keterlambatan pengangkutan dan sampah yang tidak dikelola sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya operasional. Penelitian mencatat bahwa petugas UPS Kelurahan Baiya berjumlah tiga orang. Dari dua unit armada roda empat yang tersedia, hanya satu unit yang dapat beroperasi karena unit lainnya mengalami kerusakan. Kondisi ini berdampak pada ketepatan waktu pengangkutan dan kemampuan petugas melayani seluruh wilayah. Di sisi lain, sebagian masyarakat belum konsisten menempatkan sampah sesuai jadwal pengangkutan, sementara penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai pemilahan serta pengurangan sampah dinilai belum diterima secara merata.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara tujuan kebijakan dan kondisi pelaksanaannya. Untuk memahami faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Model tersebut memandang implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta

kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Baiya dan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman mengenai proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, pengalaman para pelaksana, serta respons masyarakat terhadap pelayanan persampahan di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Fokus analisis menggunakan enam aspek model implementasi Van Meter dan Van Horn.

Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan sampah. Jumlah informan dalam penelitian adalah lima orang, yaitu satu orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, satu orang Koordinator Unit Pengelola Sampah Kelurahan Baiya, dan tiga orang masyarakat. Dalam uraian hasil wawancara, informan pemerintah yang disebutkan antara lain Ibnu Mundzir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sartono Lamatja selaku Koordinator UPS Kelurahan Baiya; informan masyarakat yang dikutip antara lain Nani dan Bambang.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pengelolaan sampah di Kelurahan Baiya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016. Mekanisme pelayanan yang dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup menempatkan sampah di sumbernya, yakni di depan rumah, untuk kemudian diangkut petugas menuju tempat penampungan sementara atau langsung ke tempat pemrosesan akhir sesuai mekanisme pelayanan. Kebijakan juga mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diharapkan dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dapat dimanfaatkan melalui bank sampah.

Sasaran kebijakan mencakup rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah Kelurahan Baiya. Namun, pemahaman terhadap standar kebijakan belum merata. Koordinator UPS menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci ketentuan perda, meskipun memahami mekanisme operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah. Sebagian warga menganggap kewajibannya selesai setelah menempatkan sampah di depan rumah dan membayar retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan telah dikenal secara praktis, tetapi pemahaman tentang pengurangan, pemilahan, dan tanggung jawab bersama belum sepenuhnya tertanam.

Dengan demikian, aspek standar dan sasaran telah memiliki dasar regulasi serta mekanisme dasar, tetapi pencapaian tujuannya belum maksimal. Kebijakan tidak hanya membutuhkan prosedur pengangkutan, melainkan juga pemahaman yang sama di antara pelaksana, warga, dan pelaku usaha mengenai kewajiban masing-masing.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sarana operasional menjadi kendala paling nyata dalam pelaksanaan kebijakan. Penanganan sampah melibatkan kelompok padat karya, petugas pengangkut sampah, serta UPS sebagai unsur pengelola dan pengawas di tingkat kelurahan. Namun, jumlah petugas UPS yang tercatat hanya tiga orang. Jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan di wilayah yang menghasilkan sampah sekitar 2,15 ton per hari pada 2023.

Keterbatasan juga terlihat pada armada. Koordinator UPS menjelaskan bahwa Kelurahan Baiya memiliki dua kendaraan roda empat, tetapi satu kendaraan mengalami kerusakan sehingga hanya satu unit yang dapat digunakan. Keterangan masyarakat juga menguatkan bahwa satu mobil yang datang untuk mengangkut sampah dirasakan belum cukup untuk melayani kebutuhan wilayah. Keterbatasan armada menyebabkan proses pengangkutan berpotensi terlambat dan tidak menjangkau seluruh rumah sesuai waktu yang diharapkan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dapat hanya dibebankan pada komitmen petugas. Ketersediaan tenaga, kendaraan yang layak, biaya operasional, dan pemeliharaan sarana merupakan prasyarat agar standar pelayanan dapat dipenuhi. Karena itu, pemulihan armada yang rusak dan penyesuaian jumlah petugas berdasarkan beban layanan perlu menjadi prioritas.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan melibatkan organisasi formal, seperti lurah, ketua RT, dan ketua RW, serta unsur operasional dan kemasyarakatan, seperti kelompok padat karya dan petugas pengangkut sampah. Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa unsur formal menjalankan fungsi koordinasi dan pengaturan, sedangkan kelompok padat karya membantu membersihkan lingkungan dan petugas pengangkut melayani pengambilan sampah dari rumah warga.

Di tingkat operasional, prosedur yang dijelaskan mencakup penempatan sampah di depan rumah, pengambilan oleh petugas sesuai jadwal, dan pengiriman ke TPS atau TPA. Meskipun pembagian peran telah dikenal, pelaksanaannya belum konsisten. Keterlambatan pengangkutan berkaitan dengan keterbatasan armada dan jumlah petugas. Dengan demikian, persoalan karakteristik pelaksana bukan semata-mata ketiadaan struktur, melainkan belum optimalnya kapasitas organisasi untuk menjalankan tugas secara teratur.

4. Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara langsung melalui kelurahan, koordinator kecamatan, pertemuan dengan masyarakat dan RT/RW, serta secara tidak langsung melalui media sosial, TVRI, dan RRI. Pada tingkat kelurahan,

koordinasi dengan UPS terutama dilakukan ketika muncul kendala operasional, misalnya keterlambatan kendaraan pengangkut.

Keterangan masyarakat menunjukkan bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah belum diterima secara rutin. Salah seorang warga menyebut informasi biasanya diperoleh ketika petugas kelurahan datang menagih retribusi, sedangkan penyampaian informasi di luar kesempatan tersebut jarang diterima. Kondisi ini memperlihatkan perbedaan antara kegiatan sosialisasi yang dilaporkan oleh instansi dan pengalaman sebagian warga sebagai penerima kebijakan.

Koordinasi antarorganisasi perlu bergerak dari pola reaktif menjadi komunikasi yang terencana. Sosialisasi berkala, penyampaian jadwal yang mudah diakses, serta saluran pengaduan mengenai keterlambatan pengangkutan dapat membantu memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas UPS memahami pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan bebas dari bau. UPS juga berupaya mengarahkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya serta memisahkan sampah berdasarkan jenis. Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan.

Di sisi masyarakat, dukungan terhadap kebersihan lingkungan belum selalu diikuti perilaku yang konsisten. Warga mengakui bahwa mereka terkadang lupa menempatkan sampah sesuai waktu pengangkutan. Artinya, sikap positif terhadap tujuan kebijakan belum sepenuhnya berubah menjadi kebiasaan sehari-hari. Penguatan disposisi pelaksana perlu disertai pembinaan dan pengawasan yang mendorong kepatuhan masyarakat, bukan hanya mengandalkan imbauan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi turut memengaruhi keberhasilan kebijakan. Secara sosial, sebagian warga telah memahami pentingnya kebersihan, tetapi masih ditemukan perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya dan ketidakpatuhan terhadap jadwal pengangkutan. Pada kelompok pelaku usaha, penerapan kebijakan juga belum merata. Sejumlah usaha telah menyediakan kantong atau tempat sampah, tetapi masih terdapat kios yang belum menyediakan sarana tersebut.

Dari sisi ekonomi dan pelayanan, pemerintah menerapkan retribusi sampah dengan besaran yang berbeda menurut kategori usaha dan rumah tangga. Dalam data Kelurahan Baiya tahun 2024, retribusi rumah masyarakat tercatat Rp10.000, kios dan rumah kos Rp35.000, warung Rp25.000, rumah makan/bengkel/salon/toko Rp100.000, restoran atau katering Rp200.000, serta usaha fotokopi Rp75.000. Keberadaan retribusi menjadi salah satu instrumen pembiayaan pelayanan, tetapi pembayaran retribusi tidak menghilangkan kewajiban warga untuk memilah, mengurangi, dan membuang sampah sesuai ketentuan.

Penelitian juga mencatat bahwa sanksi atas pelanggaran pembuangan sampah belum diterapkan secara konsisten di Kelurahan Baiya. Ketentuan sanksi telah tersedia dalam regulasi daerah, tetapi penerapan di lapangan masih terbatas. Oleh karena itu,

lingkungan kebijakan memerlukan kombinasi edukasi, penyediaan fasilitas, pengawasan, dan penegakan aturan secara proporsional. Pendekatan yang hanya menekankan tanggung jawab petugas tanpa membangun kepatuhan warga dan pelaku usaha akan membatasi hasil kebijakan.

Secara keseluruhan, keenam aspek model Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Baiya telah berjalan, tetapi belum efektif. Regulasi dan mekanisme pelayanan sudah tersedia, organisasi pelaksana telah terbentuk, dan petugas menunjukkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan. Namun, keterbatasan jumlah petugas dan armada, keterlambatan pengangkutan, sosialisasi yang belum konsisten, serta perilaku sebagian warga dan pelaku usaha menjadi hambatan yang saling berkaitan.

Data timbulan sampah memperkuat urgensi perbaikan. Sampah Kelurahan Baiya tercatat 808,66 ton pada 2021, meningkat menjadi 992,80 ton pada 2022, dan menurun menjadi 784,75 ton pada 2023. Perubahan angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati: penurunan volume tidak otomatis membuktikan peningkatan efektivitas kebijakan, terlebih penelitian masih menemukan kendala pelayanan dan kepatuhan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan sebaiknya tidak hanya dilihat dari volume sampah, tetapi juga dari ketepatan jadwal pengangkutan, jangkauan layanan, praktik pemilahan, dan partisipasi warga.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, belum berjalan secara optimal. Kebijakan telah memiliki landasan hukum dan mekanisme pelayanan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada hampir seluruh aspek implementasi. Kendala paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya operasional: petugas UPS hanya berjumlah tiga orang dan dari dua armada roda empat hanya satu yang beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan serta belum konsistennya pengangkutan sampah.

Sosialisasi dan koordinasi belum menjangkau masyarakat secara merata, sementara sebagian warga dan pelaku usaha belum konsisten memilah dan membuang sampah sesuai ketentuan. Komitmen petugas telah terlihat, tetapi belum didukung sepenuhnya oleh kapasitas sarana, komunikasi yang teratur, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Karena itu, permasalahan implementasi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis pengangkutan, melainkan sebagai persoalan keterpaduan sumber daya, organisasi, komunikasi, dan perilaku para pihak.

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu memprioritaskan perbaikan armada yang rusak dan memastikan ketersediaan kendaraan operasional yang memadai untuk melayani Kelurahan Baiya. Selain itu, pemerintah kelurahan perlu mengevaluasi kebutuhan petugas berdasarkan volume dan sebaran layanan, sekaligus memastikan jadwal pengangkutan dilaksanakan secara konsisten pada waktu yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kelurahan Baiya perlu melaksanakan sosialisasi secara berkala dan langsung kepada rumah tangga serta pelaku usaha mengenai pengurangan, pemilahan, dan penempatan sampah. Keempat, koordinasi antara DLH,

kelurahan, RT/RW, UPS, dan masyarakat perlu dibuat lebih terencana, termasuk mekanisme penyampaian informasi jadwal dan pengaduan layanan. Kelima, pengawasan dan penerapan ketentuan daerah perlu dilakukan secara konsisten dan proporsional, dengan mengutamakan pembinaan namun tetap memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran. Terakhir, masyarakat dan pelaku usaha perlu meningkatkan tanggung jawab dengan menyediakan wadah sampah, memilah sampah dari sumbernya, serta menaati jadwal pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, J., Tui, F. P. D., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 9(4), 850–868. https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504.

Agustino, L. (2017). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Ariesti, E., & Isril. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018–2019. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(Edisi I). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30149.

Keban, Y. T. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu. Yogyakarta: Gava Media.

Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 21(3), 285–292. https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Pasolong, H. (2007). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Palu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta.

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. Palu.

Satori, D., & Komariah, A. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404